

PERANG CUMBOK DI ACEH PADA 1945—1946

The Cumbok War in Aceh (1945—1946)

Oleh: T. Hajriansyach, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, teukuhajri97@gmail.com

Abstrak

Pada masa Kesultanan Aceh Darussalam, elite di masyarakat Aceh terbagi menjadi tiga, yaitu sultan, *uleebalang*, dan ulama. Ketiga unsur kekuatan ini mendominasi dan menjaga keseimbangan ekonomi, politik, dan sosial-budaya masyarakat Aceh. Namun, sejak Snouck Hurgronje, orientalis yang sekaligus terlibat dalam menentukan kebijakan politik kolonial Belanda masuk ke Aceh, suasana menjadi kacau dan konflik antarkelompok Aceh terjadi. Perang Cumbok adalah perang saudara yang tak lain merupakan puncak dari konflik berkepanjangan antara *uleebalang* dan ulama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi-kondisi apa saja yang melatarbelakangi Perang Cumbok di Aceh pada 1945—1946 dan memaparkan proses terjadinya peristiwa perang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perang Cumbok di Aceh pada 1945—1946 dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi, yakni kondisi geografi, kondisi politik dan pemerintahan, serta kondisi sosial yang berkaitan dengan kedudukan *uleebalang* dan ulama dalam tatanan sosial di Aceh pada masa itu. Pertarungan berlangsung dari akhir 1945 hingga awal 1946 yang dimenangkan oleh pihak ulama yang menghasilkan revolusi sosial dan politik di Aceh.

Kata kunci: Perang Cumbok, *uleebalang*, ulama, revolusi sosial, Aceh.

Abstract

In the era of Kesultanan Aceh Darussalam, the elite in Aceh were divided into sultan, uleebalang, and ulama. These three elements dominate and maintain the balances of economic, political, and socio-cultural aspects of the people in Aceh. Shortly after, Snouck Hurgronje, an orientalist that involved in determining colonial policies, came to Aceh then make the stable situation chaotic. Cumbok War is a civil war that is the culmination of a prolonged conflict between uleebalang and ulama. This research aims to explain the factors underlying the war and to describe the process of the occurrence of the Cumbok War in Aceh in 1945-1946. Results generated from this research are comprehension regarding the Cumbok War. The conditions of geographical, political-governmental, and social that related to the position of uleebalang and ulama in the social order at that time being the factors. The war lasted from late 1945 to early 1946 which won by the ulama had an impact on the social and political revolution in Aceh.

Keyword: The Cumbok War, *uleebalang*, ulama, social revolution, Aceh

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh sebagai provinsi yang identik dengan syariat Islam pernah memiliki pemerintahan berbentuk kerajaan pada masa pra kemerdekaan Indonesia. Setiap daerah dipimpin oleh *uleebalang* dan diberikan *sarakata* bertanda *sikureueng* (stempel Kesultanan Aceh), yaitu sebuah surat pengesahan pemberian kekuasaan.

Pada masa Kesultanan Aceh Darussalam, elite di masyarakat Aceh terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu sultan, *uleebalang*, dan ulama. Ketiga unsur kekuatan ini mendominasi dan menjaga keseimbangan ekonomi, politik, dan sosial-budaya masyarakat Aceh.¹

Kondisi pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam mulai mengalami permasalahan ketika Belanda mendeklarasikan perang terhadap Aceh, yang dikenal dengan perang Aceh. Namun, kerja sama antara sultan, *uleebalang*, dan ulama membuat Belanda sangat kesulitan

menguasai Aceh. Akhirnya, pihak Belanda mengirim Christian Snouck Hurgronje, seorang orientalis yang mempelajari agama dan keislaman sekaligus terlibat dalam menentukan kebijakan politik kolonial Belanda.

Snouck menyarankan agar pemerintah Belanda tidak melihat arti penting sultan dan harus ditinggalkan. Lebih lanjut, Snouck berpendapat bahwa hanya kelompok *uleebalang* lah yang sesungguhnya memiliki kekuasaan konkret di wilayahnya masing-masing.²

Pandangan Snouck untuk mewujudkan kerja sama yang baik dengan kelompok *uleebalang* di Aceh berdampak negatif bagi situasi ekonomi, politik, dan sosial-budaya di Aceh, yakni meningkatnya sistem feodal di kalangan masyarakat Aceh. Maka dari itu, kerja sama yang direalisasikan melalui kebijakan ini memperkuat dan memperlebar stratifikasi sosial antara kelompok *uleebalang* dan kelompok ulama.

Kalangan ulama menilai bahwa *uleebalang* hanya menjadi alat yang

¹Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 193.

²*Ibid.*, hlm. 234—235.

digunakan oleh Belanda dalam menjajah Aceh. Ulama juga berpendapat bahwa *uleebalang* telah menjadi rekan baik bagi Belanda dan secara langsung memihak kepada pemerintahan Belanda. Hal ini mengakibatkan timbulnya rivalitas dan konflik antar keduanya sehingga ulama mengambil alih kepemimpinan perlawanan terhadap Belanda.

Konflik antara kedua kelompok ini masih berlanjut ketika Jepang menduduki Aceh pada 1942. Jepang masuk ke Aceh tanpa mengalami perlawanan sedikit pun dari masyarakat Aceh karena telah dipersiapkan oleh ulama yang tergabung dalam PUSA.³

Kedatangan Jepang ke Aceh diawali dengan diutusnya dua orang perwakilan PUSA, yakni Said Abu Bakar dan Tgk. Abdoel Hamid ke Singapura. Maksud kedatangan keduanya adalah untuk membawa Bala Tentara Jepang ke Aceh dan membantu PUSA dalam upaya mengusir Belanda dari tanah Aceh.

Namun, ternyata Jepang ikut menjajah Aceh.

Sesudah proklamasi kemerdekaan, PUSA sebagai organisasi masih sulit untuk menata diri kembali. Hal ini terjadi karena pada awal kemerdekaan NKRI, posisi PUSA masih terancam oleh lawan-lawan politiknya, terutama kelompok *uleebalang*. Beberapa *uleebalang*, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mempersiapkan kedatangan tentara Belanda sebagaimana yang pernah dilakukan pihak PUSA pada saat menyambut bala tentara Jepang.

Konflik antara *uleebalang* dan PUSA semakin masif, terlebih setiap kelompok memiliki pasukan yang memadai dan kedua belah pihak berpendapat berhak mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan Jepang. Maka, puncak dari konflik berkepanjangan tersebut diselesaikan melalui perang saudara yang disebut dengan Perang Cumbok. Perang ini meluas menjadi sebuah revolusi sosial yang berhasil mengubah

³Dr. A.J. Piekaar, *Aceh dan Peperangan Dengan Jepang*, Aboe Bakar (terj.), (Banda Aceh: Pusat

Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1977), hlm. 12.

tatanan sosial masyarakat Aceh serta menghancurkan feodalisme, yang dalam hal ini merujuk pada kelompok *uleebalang*.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengkaji “Perang Cumbok di Aceh Pada 1945—1946”. Penelitian ini membahas kondisi-kondisi yang melatarbelakangi Perang Cumbok di Aceh hingga terjadinya perang serta dampaknya. Meskipun berlangsung secara singkat, perang ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor serta konflik berkepanjangan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah heuristik. Dalam hal ini, peneliti mengadakan studi pustaka (*library research*). Lalu kritik sumber yang terdiri dari kritik ekstern dan intern. Selanjutnya interpretasi, peneliti berusaha menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain yang mewujudkan suatu peristiwa perjuangan di Aceh, khususnya dalam Perang Cumbok yang mengakibatkan revolusi sosial dan politik di Aceh. Tahap akhir dalam metode penelitian sejarah, yakni historiografi, peneliti menyajikan hasil penelitian. Laporan

disusun secara deskriptif naratif berdasarkan hubungan sebab-akibat dan memperhatikan urutan peristiwa yang terjadi (kronologis).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KONDISI YANG MELATARBELAKANGI PERANG CUMBOK DI ACEH PADA 1945—1946

Kondisi politik dan pemerintahan di Aceh pada saat Belanda, Jepang dan Pasca Proklamasi sangat berpengaruh terhadap terjadinya perang Cumbok. Misalnya pada masa Belanda, dalam menghadapi dan membendung gerakan politik yang menentang kekuasaan kolonial di Aceh, pemerintah Belanda memainkan peran adat lewat kekuatan Lembaga Adat (pemerintahan *uleebalang*) sebagai perantara dan alatnya.

Belanda juga memakai politik pasifikasi dalam menghadapi rakyat Aceh. Politik pasifikasi merupakan lanjutan gagasan yang dikemukakan oleh Snouck, yaitu cara-cara simpati untuk menarik hati rakyat Aceh.

Dalam rangka politik pasifikasi ini, pemerintah Belanda melakukan beberapa usaha, di antaranya dengan meningkatkan kecerdasan rakyat, terutama anak-anak *uleebalang* yang bersedia menghentikan perlawanan dan menyerahkan diri kepada Belanda dengan memberikan pendidikan Barat.⁴ Selain itu, ada juga Korte Verklaring (perjanjian pendek) yang berisikan bahwa Belanda menggunakan *uleebalang* sebagai sekutunya dan menjauhkan ulama dari rakyat.

Tanggapan masyarakat Aceh terhadap kebijaksanaan politik pasifikasi pemerintahan Belanda berbeda-beda. Misalnya, para *uleebalang* ada yang memusuhi kehendak Belanda, di samping juga ada yang terus melakukan perlawanan. Sementara itu, para ulama ada yang tidak merespons apa-apa serta ada pula yang mengikuti *uleebalang* untuk belajar pada

pemerintahan Belanda dan juga ada yang terus mengangkat senjata.

Tidak lama setelah itu, ulama membentuk sebuah organisasi modern bernama Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) pada 1939. Kemajuan sekolah-sekolah sekuler yang didirikan Belanda dianggap merugikan sekolah agama dan menimbulkan perkembangan politik yang semakin rumit sepanjang dua dekade terakhir sejak penjajahan Belanda di Aceh. Di satu sisi keadaan ini memperkuat antagonistik antara ulama dengan *uleebalang*, tetapi di sisi lain menyadarkan sebagian *uleebalang* akan pentingnya gerakan keagamaan.⁵

Kondisi seperti ini menimbulkan konflik maupun rekonsiliasi antara ulama dan *uleebalang*. Belanda melihat adanya bahaya dalam perkembangan yang seperti ini. Oleh sebab itu, Belanda kembali menggunakan politik *divide*

⁴Rusdi Sufi, "Pasifikasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Aceh", *Makalah Seminar Sejarah Nasional IV di Yogyakarta*. (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1985, hlm. 2.

⁵Nur Agustiningasih, "Konflik Ulama-Uleebalang 1903—1946 dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Sosial di Aceh", *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2007), hlm. 67.

et impera untuk memisahkan ulama dan *uleebalang*. Bentuk pemerintahan yang didirikan Belanda di Aceh mencerminkan strategi yang dilakukan oleh Belanda yaitu mempertentangkan para *uleebalang* dengan rakyat.

Namun kondisi seperti itu tidak membuat rakyat Aceh tidak melawan lagi terhadap Belanda, Perlawanan rakyat Aceh tidak terputus sampai Belanda meninggalkan Aceh pada 1942. Perlu diketahui, bahwa pada waktu itu Jepang sudah meluaskan pengaruh dan jajahannya di sebagian besar Asia Tenggara.

Kedatangan tentara Jepang dinantikan dan telah dipersiapkan oleh sekelompok masyarakat yang dipelopori PUSA. Hal ini jelas terlihat dari kegiatan yang dilakukan oleh PUSA dalam menciptakan suasana politik sehingga rakyat akan dapat menerima kehadiran Jepang

serta turut memberikan bantuannya apabila Jepang tiba waktunya mendarat di Aceh.⁶

Kehadiran Jepang di Aceh secara otomatis menyebabkan banyaknya perubahan dalam berbagai bidang. Namun, khusus dalam bidang pemerintahan, Jepang masih memakai tradisi Belanda, yaitu dengan mengangkat kelompok *uleebalang* untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Sistem pemerintahan di Aceh pula tidak banyak diubah, meskipun sebutan nama-nama diganti dengan bahasa Jepang.⁷

Setelah menaklukkan PUSA, Jepang menempuh taktik klasik yang menyeimbangkan kaum ulama dan *uleebalang* seperti yang pernah dilakukan Belanda. Untuk itu, Jepang memaksa sebagian anggota PUSA untuk melepaskan jabatannya dalam pemerintahan lokal. Sebagai gantinya, sesudah menguatkan

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), 1980. hlm. 146.

⁷Ismuha, "Ulama Aceh Dalam Perspektip Sejarah", (Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), 1976. hlm. 59.

kekuasaan para *uleebalang*, Jepang menempatkan beberapa orang tersebut ke dalam pemerintahan lokal.⁸ Namun, Jepang juga mempertahankan beberapa pemimpin muda atau anggota Pemuda PUSA dalam beberapa jabatan pemerintahan, yang dianggapnya tidak berpotensi mengancam.

Pemerintah Jepang membentuk Majelis Agama Islam Untuk Bantuan Kemakmuran Asia Timur Raya (MIAIBKATRA), sebuah badan resmi yang dapat memberikan nasihat-nasihat kepada pemerintah di bidang agama, yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Badan resmi ini disempurnakan dengan melibatkan hampir semua ulama yang terkemuka ke dalam pengurus.

Pemerintah Jepang juga membentuk sebuah badan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang disebut dengan *Syu Sngi Kai*,

yang diketuai oleh Teuku Nyak Arif. Pemerintah Jepang seolah-olah telah memenuhi kewajibannya, padahal ini sekadar usaha menarik simpati dari rakyat Aceh. Selain mendekati diri dengan kelompok ulama, Jepang juga melakukan hal yang sama dengan kelompok *uleebalang*.⁹

Namun, rakyat diperlakukan dengan sewenang-wenang sebagai *romusha* guna kepentingan Jepang. Untuk itu, usaha yang dilakukan oleh pemerintah Jepang tidak serta merta menghasilkan respons positif dari rakyat Aceh, tetapi malah sebaliknya. Rakyat Aceh menginginkan kemerdekaan, sebagaimana telah digambarkan pada permulaan kedatangan Jepang yang disambut hangat karena rakyat menganggap dengan datangnya Jepang, Indonesia akan segera merdeka.

Setelah Jepang mengalami kekalahan dari sekutu dalam Perang

⁸Safari Daud, "Revolusi Sosial Aceh: Polarisasi Politik Ulama—Uleebalang 1945—1949", *Skripsi*, Yogyakarta, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001. hlm. 44.

⁹Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra*, (Jakarta: Muliasari, 1987), hlm. 175.

Asia Timur Raya, bangsa Indonesia pun segera memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Akan tetapi, secara resmi berita proklamasi tersebut baru sampai ke Aceh pada 24 Agustus 1945.¹⁰

Pada masa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di Aceh terdapat beberapa elite yang mempunyai kecenderungan masing-masing dan orientasi politik yang berbeda pula dalam meresponsnya. Oleh karena itu, konstelasi politik sesudah proklamasi merupakan refleksi dan interaksi yang berlangsung antara masing-masing kelompok elite.

Kelompok elite tersebut adalah *uleebalang*, ulama, pemuda, dan cendekiawan. Golongan *uleebalang* terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok yang meragukan kemampuan bangsa Indonesia untuk merealisasikan isi dan tujuan

proklamasi kemerdekaan. Kelompok ini mengharapkan Belanda berkuasa kembali di Aceh dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan pemerintahan adat.¹¹

Situasi yang sudah tidak menentu pasca proklamasi dimanfaatkan para ulama dan pemuda Aceh dengan mengadakan rapat rahasia untuk menggalang dan menyusun kekuatan guna mengisi dan mempertahankan kemerdekaan dengan membentuk organisasi pertahanan dan keamanan rakyat di daerah Aceh.

Rencana kembalinya Belanda ke Aceh setelah beberapa hari rakyat Aceh mengetahui berita proklamasi segera mendapat reaksi keras dari kalangan ulama. Untuk itu, ulama mengadakan rapat pada 15 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Tgk. Daud Beureueh bersama Tgk. Ahmad Hasballah Indrapuri dan Tgk. Hasan Krueng Kalee. Ketiga ulama besar itu mengumumkan sebuah seruan yang

¹⁰TGK. A.K. Jakobi, *Aceh dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945—1949 (dan Peranan Teuku Hamid Azwar sebagai Pejuang)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 127.

¹¹Rusdi Sufi, dkk, *Peranan Tokoh Ulama dalam Perjuangan Kemerdekaan 1945—1950 di Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh), hlm. 86.

diberi judul *Maklumat Ulama Seluruh Aceh*. Maklumat itu berisikan bahwa perjuangan melawan penjajah Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia adalah perang sabil dan orang yang tewas dalam perang itu ganjarannya adalah mati syahid.¹²

Namun demikian, persaingan antara ulama dan *uleebalang* terus berlangsung dalam barisan republik terutama di kalangan pemuda. Ketika Residen Aceh Teuku Nyak Arief mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia (API), perwiranya didominasi oleh para perwira *Gyugun* yang berorientasi kepada *uleebalang*.

Sementara itu, kelompok pemuda PUSA yang tidak mendapat kesempatan masuk API mendirikan Badan Perjuangan Rakyat (BPR) seperti PESINDO, BPI, Mujahidin, dan Hisbullah, yang bertujuan mempertahankan kemerdekaan dari musuh, baik yang datang dari luar maupun dari dalam daerah. Para pemimpin tersebut merupakan Pengurus Besar PUSA dan Pemuda PUSA.

Pembentukan laskar-laskar yang merupakan “tantara bayangan” di samping API menimbulkan perasaan curiga di kalangan sebagian kelompok *uleebalang*, terutama di daerah Pidie. Sikap kecurigaan itu pada akhirnya membuat para *uleebalang* di Pidie merasa dirinya terancam oleh reaksi dari pihak ulama dan mengakibatkan terjadinya konflik antara kedua elite ini, yang kemudian menjurus kepada pecahnya Perang Cumbok.

B. PERANG CUMBOK DI ACEH PADA 1945—1946

Cumbok adalah nama suatu desa di Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, Aceh Utara. Kepala daerah di Cumbok disebut Uleebalang Cumbok dengan gelar Teuku Sari Muda Pahlawan Bintara. Pimpinan Cumbok dikenal juga dengan sebutan Teuku Daud Cumbok.

Secara singkat terdapat beberapa kejadian yang mengawali Perang Cumbok. *Pertama*, rapat

¹²Akmal Nasery Basral, *Napoleon Dari Tanah Rencong: Sebuah Novelisasi Perjuangan Hasan*

Saleh, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 144.

uleebalang di rumah Teuku Keumangan Umar di Beureunun. *Kedua*, peristiwa Sigli. *Ketiga*, perjanjian antara ulama dan *uleebalang* terkait Peristiwa Sigli.

Pada 22 Oktober 1945, kelompok *uleebalang* mengadakan rapat di Beureunun dan mengambil keputusan untuk membentuk Barisan Penjaga Keamanan (BPK). Selanjutnya dibentuklah suatu organisasi yang bernama Markas *Uleebalang* dan membentuk tentara dari tiga kelompok, yaitu Barisan Cap Bintang, Barisan Cap Sauh, dan Barisan Cap Tombak.

Pada November 1945, suhu politik di daerah Pidie memuncak. Hal ini disebabkan oleh Teuku Daud Cumbok beserta kawan-kawannya yang menghendaki agar senjata Jepang yang masih berada di Sigli diambil alih oleh kelompok *uleebalang*. Kala tuntutan para *uleebalang* itu dilontarkan, Jepang masih belum menyerahkan senjata-senjatanya kepada masyarakat Sigli.

Di sisi lain, Jepang menjanjikan kepada Republik Indonesia yang didominasi oleh PUSA.¹³

Kedua kelompok terlibat dalam pertempuran dan menyebabkan banyak korban yang berlangsung sejak 4—6 Desember 1945. Para pemimpin rakyat, pemerintah daerah, dan TKR di bawah pimpinan Kolonel Sjamaun Gaharu dan Mayor Teuku A. Hamid Azwar berusaha keras menghentikan pertempuran. Akhirnya pada 6 Desember 1945 pertempuran dapat dihentikan. Kedua belah pihak diminta untuk mengosongkan Sigli dan kembali ke tempat masing-masing.¹⁴

Pada 10 Desember 1945, untuk kali kedua diadakan pertemuan di kediaman Teuku Laksamana Umar, *Uleebalang Nyong*, di Luengputu yang diinisiasi oleh Markas *Uleebalang*. Hasil pertemuan itu memperuncing kembali suasana buruk dan tidak lagi menghiraukan ketentuan yang telah disepakati

¹³M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureu-eh Dalam Pergolakan Aceh*, (Jakarta: Media Da'wah, 2001), hlm. 115.

¹⁴Amrizal J. Prang, *Aceh dari Konflik ke Damai*, (Banda Aceh: Bandar Pub, 2008), hlm. 63.

bersama di Sigli. *Uleebalang* setuju agar Markas *Uleebalang* bertindak lebih tegas lagi untuk menangkap para pemimpin yang menentang gerakannya. Setelah pertemuan ini, Teuku Muhammad Daud mengambil tindakan terhadap tokoh-tokoh penting PUSA dan perlawanan lain yang dapat dijumpainya.¹⁵

Pada 16 Desember 1945 BPK menembaki kampung-kampung di sekitar Lueng Putu dan Metareum yang selama itu menjadi pemusatan para pemuda dan rakyat, terutama dari organisasi PRI. Penembakan itu terus berlanjut hingga pada 20 Desember 1945 BPK membakar gedung sekolah agama di Titeue serta kantor kehakiman di beberapa tempat.¹⁶

Pada 22 Desember 1945 pemerintah pusat bersama pimpinan TKR membentuk Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) untuk melawan para *uleebalang*. Pada dini hari 25 Desember 1945, tanpa

menunggu datangnya bantuan dari luar Kabupaten Pidie, MBRU menggerakkan pasukannya dari Garot dan Tangse untuk mengepung markas BPK di Lammeulo. Pertempuran sekitar Lammeulo ini merupakan tanda awal pengejaran *uleebalang* di seluruh Aceh. Banyak *uleebalang* yang terbunuh dan yang lainnya dipenjarakan.¹⁷

Pada 30 Desember 1945 BPK melancarkan serangan besar-besaran terhadap pusat-pusat PUSA/PRI di distrik Metareuem. Pasukannya maju di sepanjang jalan ke Garot dan Sigli dan dengan mudah menundukkan perlawanan sekadarnya dari pemuda-pemuda di Metareuem.¹⁸

Untuk mencegah konflik dan pertumpahan darah yang meluas, pemerintah daerah memberikan ultimatum sebagai berikut: *Pertama*, Pemerintahan Daerah Aceh menyatakan pasukan *uleebalang* yang berpusat di Lammeulo sebagai pengkhianat dan musuh Republik

¹⁵Abdullah Ali, *op.cit.*, hlm. 239.

¹⁶Amrizal J. Prang, *op.cit.*, hlm. 65.

¹⁷Nazzarudin Sjamsuddin, *op.cit.*, hlm. 163.

¹⁸Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra*, (Jakarta: CV. Muliasari, 1987), hlm. 334.

Indonesia. *Kedua*, menuntut agar para *uleebalang* menyerahkan senjata sebelum 10 Januari 1945. Ultimatum tersebut ditolak karena dianggap tidak menguntungkan *uleebalang*. Penolakan ultimatum tersebut berakibat bentrokan fisik terjadi lagi antara kelompok ulama dan kelompok *uleebalang*.¹⁹

Setelah itu, pasukan TKR bersama rakyat beralih ke Lammeulo. Pada 12 Januari 1946 terjadi penyerangan yang dilakukan dari barat, selatan (berasal dari Titeue yang dilakukan oleh barisan rakyat dari Tangse dan Padang Tiji), dan timur. Penyerangan ini berhasil dan membuat Markas *Uleebalang* dapat dikuasai oleh TKR dan barisan rakyat. Namun, T. Muhammad Daud Cumbok beserta pasukan pengikutnya berhasil lolos melarikan diri.

Pada 16 Januari 1946 Teuku Muhammad Daud Cumbok ditangkap oleh TKR dan barisan rakyat di kaki Gunung Seulawah lalu dibawa ke

Sigli dan dipindahkan ke Kantor Cabang pusat Markas *Uleebalang* di Garut. Sesampainya di Garut, Teuku Muhammad Daud Cumbok beserta pasukan pengikutnya dievakuasi ke Sanggeue untuk dieksekusi.²⁰

Jatuhnya Lammeulo merupakan sebuah pertanda bagi berakhirnya sistem pemerintahan *uleebalang* di Aceh. Berakhirnya Perang Cumbok di Aceh memberi arti semakin lumpuhnya kekuatan dan kekuasaan kelompok *uleebalang* sebagai kepala pemerintah daerah Aceh yang dipegang selama berabad-abad. Kekuasaan itu beralih kepada kelompok ulama yang memenangkan perang.

C. DAMPAK PERANG CUMBOK TERHADAP KEADAAN SOSIAL DAN POLITIK DI ACEH

Perang Cumbok merupakan faktor khusus terjadinya Revolusi Sosial di Aceh. Dengan kata lain, terjadinya Revolusi Sosial di Aceh merupakan lanjutan secara langsung

¹⁹Abdullah Ali, *op.cit.*, hlm. 240.

²⁰S.M. Amin, Kenangan-kenangan dari Masa Lampau,

(Jakarta: Pradya Paramita, 1978), hlm. 138.

dari Perang Cumbok di Pidie. Revolusi sosial berakhir dengan lengsernya semua *uleebalang* Cumbok dari jabatannya dan digantikan oleh ulama-ulama anggota PUSA dan simpatisannya.²¹

Dalam waktu dua bulan, yaitu Desember 1945 dan Januari 1946, kaum *uleebalang* benar-benar disingkirkan. *Uleebalang* yang berhasil selamat diharuskan untuk melepas hak kekuasaan yang diperoleh secara turun-temurun. Selain itu, harta miliknya pun disita.²²

Pada Februari 1946, kekacauan terjadi di Aceh Timur yang menandakan revolusi sosial tahap kedua telah dimulai. Teuku Pidie yang menjadi Asisten Residen Aceh Timur dan Teuku Alibasyah Wedana Langsa ditangkap kemudian dibunuh kelompok PUSA dengan tuduhan mendukung Cumbok. Pada bulan tersebut, Husin Al Mujahid membentuk TPR di Idi.

Kejadian ini merupakan tragedi bagi rakyat Aceh sebab menimbulkan banyak korban, baik dari *uleebalang* maupun kalangan ulama sendiri. Data menyebutkan bahwa 98 bangsawan menjadi korban Perang Cumbok. Data tersebut belum termasuk yang gugur akibat ekspedisi TPR selama Februari—Maret 1946 yang jumlahnya mencapai puluhan orang.²³

KESIMPULAN

Pada bagian akhir peneliti menyimpulkan secara singkat guna memberikan gambaran secara global dari apa yang telah peneliti paparkan sebelumnya. Perang Cumbok adalah perang saudara yang tak lain merupakan puncak dari konflik berkepanjangan antara *uleebalang* dan ulama. Perang Cumbok di Aceh pada 1945—1946 dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi, yakni kondisi geografi, kondisi politik dan pemerintahan, serta kondisi sosial

²¹Umar Ibrahim, "PUSA dalam Revolusi Sosial di Aceh", *Skripsi*, (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 1988), hlm. 126.

²²C. Van Djik, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, (Jakarta:

Pustaka Utama Grafiti, 197), hlm. 259.

²³Adrey R. Kahin, *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), hlm. 103.

yang berkaitan dengan kedudukan *uleebalang* dan ulama dalam tatanan sosial di Aceh pada masa itu. Pertarungan berlangsung dari akhir 1945 hingga awal 1946 yang dimenangkan oleh pihak ulama yang menghasilkan revolusi sosial dan politik di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ali, dkk., *Sejarah Perjuangan Rakyat Aceh Dalam Perang Kemerdekaan 1945—1949*. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1985.
- Adrey R. Kahin, *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989).
- Akmal Nasery Basral, *Napoleon Dari Tanah Rencong: Sebuah Novelisasi Perjuangan Hasan Saleh*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).
- Amrizal J. Prang, *Aceh dari Konflik ke Damai*, (Banda Aceh: Bandar Pub, 2008).
- Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra*, (Jakarta: Muliasari, 1987).
- C. Van Djik, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 197). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), 1980.
- Ismuha, “Ulama Aceh Dalam Perspektip Sejarah”, (Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), 1976.
- M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureu-eh Dalam Pergolakan Aceh*, (Jakarta: Media Da’wah, 2001).
- Nazaruddin Sjamsuddin, *Revolusi di Serambi Mekah (Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945—1946)*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1999.
- Nur Agustiningasih, “Konflik Ulama-Uleebalang 1903—1946 dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Sosial di Aceh”, *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2007).
- Rusdi Sufi, “Pasifikasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Aceh”, *Makalah Seminar Sejarah Nasional IV di Yogyakarta*. (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1985).
- _____, dkk, *Peranan Tokoh Ulama dalam Perjuangan Kemerdekaan 1945—1950 di Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh).
- S.M. Amin, *Kenang-kenangan dari Masa Lampau*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1978). Safari Daud, “Revolusi Sosial Aceh: Polarisasi Politik Ulama—Uleebalang 1945—1949”, *Skripsi*, Yogyakarta, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001.

Proklamasi Kemerdekaan 1945—1949 (dan Peranan Teuku Hamid Azwar sebagai Pejuang), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

Umar Ibrahim, “PUSA dalam Revolusi Sosial di Aceh”, *Skripsi*, (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 1988).

Yogyakarta, 06 November 2019

Pembimbing TAS

Reviewer


Dra. Dina Dwi Kurniarini M.Hum

NIP. 19571209 198702 2 001


Dr. Miftahuddin, M.Hum.

NIP. 19740302 200312 1 006

